

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana yang dilaporkan oleh *World Tourism Barometer* (UNWTO, 2024). Pada akhir tahun 2023, pariwisata global telah mencapai 88% tingkat pemulihan. Meningkatnya jumlah pemulihan pariwisata global terlihat dengan jumlah data, bahwa tercatat sebanyak 1.285 juta wisatawan melakukan perjalanan internasional pada periode Januari-Desember 2023 yang mencerminkan peningkatan sebesar 34% dibandingkan pada tahun 2022 (UNWTO, 2024). Secara regional, Timur Tengah memimpin pemulihan pariwisata global, dengan jumlah kedatangan wisatawan internasional dari Januari hingga Desember 2023 mencapai 122%, atau meningkat 22% di atas tingkat kedatangan pra-pandemi tahun 2019. Selanjutnya, Eropa berhasil memulihkan 94% dari tingkat pra-pandemi. Afrika menunjukkan pemulihan sebesar 96% dari tingkat pra-pandemi, sementara Amerika mencatat pemulihan sebesar 88%. Sebaliknya, pemulihan di daerah Asia dan Pasifik mencapai 65% dari tingkat kedatangan pra-pandemi pada periode yang sama dalam sektor pariwisata (UNWTO, 2024).

Pemulihan pariwisata global berdampak secara langsung memengaruhi peredaran uang, barang dan jasa, dan menghasilkan dampak ekonomi yang

signifikan, termasuk pada peningkatan PDB. Berdasarkan (WTTC, 2024) kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Global sebesar 9,1 % dimana terjadi peningkatan 23,2% dari tahun 2022 dan hanya berada 4,1% di bawah level sebelum pandemik yaitu 2019. Hal ini juga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja, terbukanya 27 juta pekerjaan baru di bidang pariwisata, di mana menunjukkan peningkatan sebesar 9,1 % dibandingkan di bawah level sebelum pandemik di tahun 2019 (WTTC, 2024). Hal ini disebabkan karena kegiatan pariwisata mendorong pertumbuhan berbagai sektor industri karena aktivitasnya menciptakan relasi antara pasokan dan permintaan terhadap produk dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan. Dengan demikian, sektor pariwisata berperan signifikan dalam menggerakkan perekonomian melalui interaksi antara konsumen dan penyedia layanan (Eddyono, 2021).

Kontribusi Pariwisata dalam aspek perekonomian yang tinggi disertai dengan peningkatan aktivitas pariwisata akibat peningkatan jumlah wisatawan juga berdampak pada pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan internasional dan domestik setiap tahun memunculkan tantangan yang semakin kompleks (UNWTO, 2024) disertai dengan perkembangan pariwisata tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, namun juga berdampak pada aspek sosial, budaya dan lingkungan (Eddyono, 2021).

Pada aspek lingkungan dapat memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan, seperti kerusakan habitat, penurunan kualitas air serta

pencemaran udara. Berdasarkan data jejak karbon, industri Pariwisata menghasilkan sekitar 8% dari total emisi karbon dunia. Setengah dari emisi karbon dihasilkan dari 49 % transportasi udara dan kapal diikuti 12% oleh barang-barang atau souvenir, selanjutnya 10% dari bidang makanan dan minuman, 8% masing-masing dari bidang agrikultur dan jasa pelayanan dan kemudian yang menyumbangkan 6% dari sarana akomodasi dan konstruksi (Lenzen et al., 2018). Sejalan dengan hal ini, (Gössling & Lund-Durlacher, 2021) menyatakan bahwa akomodasi merupakan salah satu sumber konsumsi energi dengan jejak karbon tertinggi karena adanya penggunaan listrik, air, peralatan dan pendingin udara serta energi primer seperti minyak dan gas untuk pemanas dan air panas.

Selain berdampak pada aspek lingkungan, perkembangan sektor pariwisata juga menimbulkan dampak terhadap aspek budaya, seperti melemahnya nilai-nilai dan kearifan lokal akibat proses akulturasi (Piuchan et al., 2018). Tantangan yang semakin kompleks, seperti emisi gas rumah kaca, kebocoran ekonomi, pengelolaan sumber daya, serta dampak terhadap komunitas lokal dan aset budaya (UNWTO, 2024).

Melihat adanya dampak dari aktivitas pariwisata baik secara positif maupun negatif, menjadikan perkembangan pariwisata sebagai salah satu isu global dan menjadi perhatian utama dalam industri pariwisata sebagai salah satu sektor yang secara signifikan berkontribusi terhadap tantangan ini. Semua dampak perlu dikelola secara kolektif untuk membangun pariwisata yang

berkelanjutan (Nurlena et al., 2021) dikarenakan masyarakat, lingkungan serta ekonomi memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain (del Río-Vázquez et al., 2019). Selain itu, menurut (UNWTO, 2024) perlu adanya penanganan terhadap tantangan pada sektor pariwisata secara berkelanjutan. Berdasarkan tujuan kunjungan wisatawan pada tahun 2019, sebesar 95% berkaitan dengan budaya dan alam yang menjadi tren pariwisata (Haxton & Ollivaud, 2019), selaras dengan meningkatnya tren nilai berkelanjutan dan budaya dalam tren pariwisata (Kemenparekraf, 2023). Dengan demikian, semakin meningkatnya kesadaran global terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga lahirlah ide dan gagasan dari para ekspert untuk penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan pada sektor pariwisata salah satunya adalah *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC, 2019). GSTC didirikan dengan tujuan menjalankan pariwisata yang berkelanjutan.

Menurut (GSTC, 2019), pariwisata berkelanjutan adalah praktik yang mendukung keberlanjutan dalam sektor pariwisata dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan baik saat ini maupun di masa depan, serta memenuhi kebutuhan para wisatawan, industri, lingkungan, dan komunitas lokal, dengan menyeimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi budaya lokal,

meminimalkan dampak lingkungan, dan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Pariwisata berkelanjutan telah diakui sebagai kerangka kerja penting dalam pembangunan destinasi, dengan menekankan perlunya pengelolaan yang terpadu. Pariwisata berkelanjutan merujuk pada prinsip dan praktik pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk membuat sebuah destinasi lebih baik bagi penduduk setempat maupun pengunjung. Pariwisata berkelanjutan berupaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif sosial, ekonomi, serta lingkungan alam dalam komunitas destinasi (Wall, 2021).

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi perhatian dari berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini beriringan dengan meningkatnya peran dan kontribusi sektor pariwisata Indonesia terhadap perekonomian nasional, kesadaran dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan juga semakin berkembang (Tjiptono et al., 2022). Menurut statistik yang dirilis (BPS, 2022), sektor pariwisata berkontribusi sekitar 4,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021, yang diprediksikan terus meningkat setelah melewati pandemik Covid-19. Tingginya nilai PDB Indonesia tidak luput dirasakan oleh usaha mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut dapat terlihat pada tahun 2023 penerimaan nilai devisa pariwisata Indonesia hingga mencapai US\$6,08 miliar (Kemenparekraf, 2023). Hal ini menjadikan sektor pariwisata telah mendapat

pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia, sebagai salah satu sektor unggulan utama yang kemudian menggiring Indonesia kepada berbagai keberhasilan *Asia's Leading Adventure Tourism Destination 2024* dari *World Travel Awards*, yang dikenal sebagai 'Oscar' dalam industri perjalanan dan perhotelan. Selain itu, dalam *Travel and Tourism Development Index (TTDI)* yang dirilis oleh World Economic Forum, 2024, Indonesia berhasil menempati peringkat 22 dari 119 negara dengan skor 4,46, mengalami peningkatan 10 peringkat dibandingkan tahun 2021.

Dengan melihat dampaknya sektor pariwisata pada sumber devisa dan kebangunan ekonomi di Indonesia, maka pembangunan infrastruktur dan juga aksesibilitas menuju destinasi wisata telah dan terus dibangun untuk menggerakkan pariwisata beserta pemberdayaan masyarakatnya (Sulistyadi et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan konsep atau praktik pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan perencanaan dan pengembangan pariwisata di negara ini (Lemy et al., 2019). Konsep dan praktik pariwisata berkelanjutan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 yang mencakup prinsip dan tujuan Pengembangan Pariwisata Indonesia Isu ini dibahas dalam pertemuan ilmiah internasional dan diajarkan dalam program studi manajemen pariwisata. Namun, kebijakan nasional yang mendukung hal ini baru jelas pada tahun 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14, yang berisi pedoman untuk membangun destinasi pariwisata berkelanjutan (Lemy et al., 2019), yang selanjutnya direvisi sesuai dengan standar *Global*

Sustainable Tourism Council (GSTC) menjadi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Kementerian Pariwisata, 2021).

Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan mencakup empat pilar utama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu meliputi pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Pedoman ini diharapkan oleh pemerintah untuk dapat diterapkan dengan tujuan memperkuat tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang multikultur dalam mengelola daya tarik lingkungan alam dan budaya di destinasi wisata. Di bidang ekonomi, kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan memastikan manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Aspek sosial-budaya menitikberatkan pada pelestarian budaya lokal serta melindungi nilai-nilai sosial masyarakat agar tidak terganggu oleh pariwisata. Aspek lingkungan fokus pada pengurangan dampak negatif, seperti pengelolaan limbah dan konservasi alam, guna melindungi ekosistem. Sementara itu, tata kelola berusaha meningkatkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta—untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pedoman destinasi berkelanjutan dapat diterapkan pada destinasi skala besar dan skala kecil, seperti kota atau wilayah yang cukup besar Kabupaten, Resort, Taman Nasional, Kelompok, Komunitas Lokal dan Desa Wisata. Menurut (Jadesta, 2025), hingga pertengahan tahun 2025 terdapat sebanyak 6.112 desa wisata yang tersebar di Indonesia berdasarkan klasifikasinya, namun belum semuanya menjalankan tata kelola sebagai desa wisata yang berkelanjutan Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1
Jumlah Desa Wisata Berkelanjutan



Sumber: (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2025)

Berdasarkan gambar 1.1, pada periode tahun 2020 hingga tahun 2023 dan pada periode tahun 2021 hingga tahun 2024 masing-masing terdapat sebanyak 16 desa wisata yang mendapatkan sertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan dan pada periode tahun 2022 hingga tahun 2025 hanya terdapat 4 desa wisata berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hingga kini belum banyak desa wisata yang secara resmi dinyatakan sebagai desa wisata

berkelanjutan berdasarkan Pedoman Pariwisata Berkelanjutan. Selain itu, masih terbatas pula penelitian yang menggunakan pedoman tersebut secara sistematis dalam mengukur praktik keberlanjutan di tingkat desa, terutama di kawasan Indonesia bagian timur.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam industri pariwisata namun belum tergarap optimal adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah ini menyimpan kekayaan budaya, keanekaragaman hayati, serta bentang alam yang unik, menjadikannya sangat potensial untuk pengembangan desa wisata berbasis komunitas dan keberlanjutan. Salah satu desa wisata yang menonjol di wilayah ini adalah Desa Liang Ndara di Kabupaten Manggarai Barat. Desa ini berada dalam kawasan pendukung Destinasi Super Prioritas (DSP) yaitu Labuan Bajo, sebuah kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai salah satu dari lima wilayah prioritas pengembangan pariwisata nasional (mendeley DSP). Penetapan DSP Labuan Bajo mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, promosi, dan investasi pariwisata, yang turut berdampak pada desa-desa di sekitarnya, termasuk Desa Wisata Liang Ndara. Desa Wisata Liang Ndara merupakan salah satu desa wisata yang memiliki daya tarik budaya Manggarai, dan juga wisata alam yang memukau. Desa Wisata Liang Ndara telah memperoleh sertifikasi sebagai Desa Wisata Berkelanjutan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan mitra pembangunan. Desa Liang Ndara masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan

infrastruktur, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan produk wisata yang lebih beragam, dan masalah kebersihan (Sari et al., 2024). Desa Liang Ndara menghadapi tantangan dalam pengembangan pariwisata terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan profesional di bidang pariwisata, serta organisasi manajemen yang dinilai masih kurang efektif serta terkoordinasi. Selain itu, menurut (Ridho, 2022) pemberdayaan masyarakat di Desa Liang Ndara telah dilaksanakan melalui serangkaian tahap pengembangan kapasitas oleh pemerintah daerah dan pengelola desa wisata, dan menghasilkan peningkatan keterampilan, namun demikian terdapat sejumlah kendala seperti konflik sosial, lemahnya penyelesaian kebijakan, serta hambatan akses sumber daya turut menghambat keberlanjutan dampak ekonomi secara merata di kalangan masyarakat. Hal ini berbanding terbalik dengan desa wisata Tiworiwu, yang juga merupakan sebuah Desa Wisata yang memiliki atraksi budaya dan alam yang terletak di Kabupaten Ngada, Flores Nusa Tenggara Timur. Namun beberapa masalah yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman masyarakat lokal mengenai pentingnya pariwisata berkelanjutan, serta belum optimal dalam memastikan standar keberlanjutan diketahui dan diterapkan secara konsisten dan yang memberikan acuan yang komprehensif dalam pengelolaan destinasi pariwisata secara berkelanjutan. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa aspek ekonomi di Desa Wisata Tiworiwu terbukti mampu memberikan manfaat kesejahteraan

langsung kepada masyarakat lokal. Hal ini berbeda dengan Desa Liang Ndara, di mana mengalami penurunan dalam pemanfaatan desa wisata sehingga dampak ekonomi yang tidak dirasakan oleh pihak di Liang Ndara. Kondisi ini mencerminkan adanya celah antara pendekatan formal mengenai standar penerapan pariwisata berkelanjutan dan realitas praktik di lapangan, yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal serta pemahaman kontekstual dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Temuan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan nilai pedoman formal, melainkan memperkuat urgensi terciptanya sinergi antara kebijakan standar dengan kekuatan sosial berbasis komunitas, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam implementasi prinsip keberlanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membandingkan penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan desa wisata berbasis komunitas di Desa Wisata Liang Ndara dan Desa Wisata Tiworiwu. Kedua desa dipilih karena memiliki karakteristik budaya yang kuat sebagai daya tarik utama, namun berada pada kondisi dan tahap perkembangan yang berbeda. Kedua desa juga memiliki kesamaan karakteristik sosial-ekonomi sebagai masyarakat agraris yang tengah mengalami transformasi menuju desa wisata berbasis komunitas. Desa Liang Ndara merupakan desa wisata yang telah tersertifikasi sebagai Desa Wisata Berkelanjutan, namun mengalami penurunan dalam implementasi prinsip keberlanjutan, terutama pada aspek partisipasi masyarakat dan distribusi manfaat ekonomi. Sebaliknya, Desa Tiworiwu belum tersertifikasi,

tetapi menunjukkan tingkat kesadaran komunitas yang tinggi, partisipasi aktif warga, serta sistem pengelolaan berbasis gotong royong yang berjalan efektif meskipun tanpa panduan formal.

Pendekatan studi komparatif dalam konteks ini tidak hanya memungkinkan pemetaan capaian keberlanjutan masing-masing desa, tetapi juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor lokal yang memengaruhi keberhasilan praktik pariwisata berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat menjadi dasar penyusunan strategi pengembangan desa wisata lainnya, khususnya di wilayah Indonesia timur. Selain itu, perbandingan antar desa wisata dalam satu wilayah provinsi menjadi penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang diterapkan secara efektif oleh masing-masing desa wisata dalam mendukung keberlanjutan. Temuan *best practices* ini penting sebagai referensi konkret yang dapat diadaptasi oleh desa wisata lain dengan kondisi serupa, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur yang memiliki konteks sosial, geografis, dan kelembagaan yang khas. Dengan mengungkap praktik-praktik pengelolaan yang berhasil, studi ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran perbandingan capaian antar desa, tetapi juga menawarkan pembelajaran lintas konteks yang aplikatif dan berkontribusi dalam memperkuat pengembangan pariwisata berbasis komunitas secara berkelanjutan. Pengalaman keberhasilan atau tantangan dari satu desa dapat menjadi referensi berharga bagi pengembangan desa wisata lainnya yang memiliki konteks serupa, serta mengetahui hambatan implementasi, serta

peluang penguatan kelembagaan lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menyoroti pentingnya penguatan tata kelola desa wisata secara profesional dalam rangka mendukung implementasi pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan yang efektif dan terarah diharapkan dapat memastikan bahwa desa wisata mampu memberikan manfaat kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dalam jangka panjang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyusunan kebijakan pengembangan desa wisata yang berbasis data empiris (*evidence-based*) dan sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pergeseran menuju pariwisata yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta mendukung kebijakan yang relevan di sektor pariwisata. Dengan menggunakan studi kasus pada dua Desa wisata, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pengelolaan Desa Wisata pada kedua desa wisata dalam memenuhi standar berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan di tingkat desa wisata, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, meskipun potensi budaya, alam, dan komunitas lokal sangat besar.
2. Masih terbatasnya desa wisata yang diakui atau menjalankan praktik pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan, sebagaimana tercermin dari data

nasional, serta minimnya penggunaan pedoman keberlanjutan secara sistematis dalam pengembangan dan evaluasi desa wisata.

3. Adanya perbedaan capaian manfaat ekonomi dan sosial antar desa wisata yang telah mengembangkan pariwisata berbasis komunitas. Dalam pra-penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Desa Wisata Tiworiwu menunjukkan kontribusi ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat lokal dibandingkan dengan Desa Liang Ndara, meskipun keduanya memiliki potensi atraksi yang sama.
4. Diperlukan kajian lebih dalam mengenai faktor-faktor lokal yang memengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan, baik dari aspek sosial-budaya, kelembagaan, maupun tata kelola, guna menghasilkan rekomendasi pengembangan desa wisata yang relevan dan berbasis bukti (*evidence-based*).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan dan kondisi aktual penerapan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan berdasarkan Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 pada Desa Wisata Liang Ndara dan Desa Wisata Tiworiwu?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan dalam pencapaian indikator keberlanjutan pada aspek pengelolaan, sosial dan ekonomi, budaya, dan lingkungan antara Desa Wisata Liang Ndara dan Desa Wisata Tiworiwu?

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pengukuran pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan pada Desa Wisata Liang Ndara dan Desa Wisata Tiworiwu?
4. Bagaimana *best practices* yang dapat diterapkan sebagai rekomendasi dalam pengelolaan destinasi pariwisata di Desa Wisata Liang Ndara dan Desa Wisata Tiworiwu dapat ditingkatkan untuk mencapai kinerja desa wisata yang berkelanjutan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses dan kondisi aktual penerapan pedoman destinasi berdasarkan pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan menurut Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 di Desa Wisata Liang Ndara dan Desa Wisata Tiworiwu.
2. Untuk membandingkan pencapaian indikator keberlanjutan di Desa Wisata Liang Ndara dan Desa Wisata Tiworiwu.
3. Untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Liang Ndara dan Desa Wisata Tiworiwu.
4. Untuk merumuskan rekomendasi yang mendukung peningkatan kinerja destinasi pariwisata yang berkelanjutan pada desa wisata.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi sektor pariwisata lokal

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan potensi pariwisata pada destinasi wisata yaitu Desa Wisata dengan memperkenalkan praktik pariwisata yang berkelanjutan dalam aspek pengelolaan, sosial ekonomi, budaya dan lingkungan.

2. Manfaat bagi masyarakat lokal

Penelitian ini dapat memberdayakan masyarakat lokal dengan mendorong keterlibatan masyarakat dan meningkatkan pemahaman mengenai Pariwisata Berkelanjutan dan penerapan desa wisata berdasarkan standar Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 sehingga dapat mendukung pengelolaan dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi, budaya, dan lingkungan.

3. Manfaat bagi perekonomian lokal

Penelitian ini dapat berkontribusi pada penguatan perekonomian lokal melalui pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengelolaan struktur pilar sosial dan ekonomi yang memberikan manfaat yang merata sehingga dapat menghadirkan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

4. Memperkuat identitas destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur

Penerapan standar Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dapat membantu memperkuat identitas Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi

pariwisata yang berkomitmen terhadap pelestarian destinasi pariwisata dalam budaya lokal dan lingkungan dengan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

5. Manfaat dalam bidang pendidikan Pariwisata

Penelitian ini dapat digunakan sebagai materi pembelajaran di institusi pendidikan yang berfokus pada pariwisata, manajemen lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Penerapan standar Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No.9 Tahun 2021 dapat dijadikan model dalam pengajaran tentang pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

F. Batasan Penelitian

Untuk menjaga fokus dan keterukuran hasil, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Batasan Lokasi

Penelitian hanya dilakukan di dua desa wisata di wilayah Provinsi NTT, yaitu Tiworiwu dan Liang Dara. Hasil tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh desa wisata di Indonesia, tetapi dapat memberikan gambaran kontekstual dan perbandingan regional.

2. Batasan Waktu

Penelitian dilakukan dalam rentang waktu tertentu pada tahun berjalan (Desember 2024- Februari 2025), sehingga data yang diperoleh mencerminkan

kondisi saat itu dan tidak mempertimbangkan dinamika jangka panjang secara penuh.

3. Batasan Data

Data yang dikumpulkan mencakup observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini tidak mengakses seluruh data statistik makro, melainkan berfokus pada data lokal dan persepsi pemangku kepentingan di tingkat desa, dan berdasarkan bukti pendukung yang diberikan dalam mendukung setiap indikator aspek berkelanjutan.

4. Batasan Aspek Keberlanjutan

Penilaian keberlanjutan dibatasi pada indikator yang tercantum dalam pedoman resmi Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Permenparekraf No. 9 Tahun 2021, yaitu indikator pengelolaan berkelanjutan meliputi aspek struktur kerja dan pengelolaan serta keterlibatan pengelola Desa Wisata dalam menghadapi tantangan, keberlanjutan sosial ekonomi meliputi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal serta kesejahteraan bagi masyarakat dan dampak sosial, keberlanjutan budaya meliputi perlindungan warisan budaya dan situs budaya, keberlanjutan lingkungan mengenai konservasi warisan alam dan pengelolaan sumber daya dan emisi. Aspek lain yang tidak tercantum dalam pedoman tidak dibahas secara mendalam.

5. Batasan Pendekatan Analisis

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-evaluatif dan komparatif, bukan eksplanatori-kausal. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak bertujuan

untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel, melainkan untuk menggambarkan dan membandingkan tingkat keberlanjutan kedua desa wisata.

